

BAB VI

PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Penerapan collaborative governance dalam pengelolaan pariwisata Pantai Padang sudah mulai berjalan, meskipun belum sepenuhnya optimal. Kolaborasi ini muncul sebagai bentuk kesadaran bahwa pemerintah tidak mampu menyelesaikan kompleksitas permasalahan di kawasan wisata secara sepihak. Oleh karena itu, dibutuhkan keterlibatan aktif dari berbagai pemangku kepentingan. Permasalahan utama yang melatarbelakangi perlunya kolaborasi antara lain adalah persoalan lingkungan seperti sampah yang berserakan, pedagang yang berjualan tidak tertib, serta adanya praktik premanisme yang mengganggu kenyamanan wisatawan. Pemerintah Kota Padang bersama Dinas Pariwisata merespons persoalan ini dengan melibatkan berbagai pihak dalam proses pengambilan keputusan serta pelaksanaan kebijakan. Pedagang, masyarakat lokal, aparat keamanan, hingga pihak swasta seperti pengelola hotel dan organisasi masyarakat, turut berperan dalam proses perencanaan dan pengelolaan kawasan wisata tersebut.

Salah satu bentuk nyata dari kolaborasi ini adalah kegiatan rutin seperti bersih-bersih pantai, pengadaan event pariwisata seperti Pesona Pantai Padang, serta upaya penataan pedagang agar tidak berjualan sembarangan. Kegiatan tersebut mencerminkan collective action dan shared motivation dari seluruh aktor untuk menjadikan Pantai Padang sebagai destinasi wisata yang bersih, tertib, dan menarik.

Pemerintah juga memberikan ruang partisipatif melalui forum dialog, pendataan pedagang, hingga kebijakan relokasi warung ke zona yang telah ditentukan. Respons positif dari pedagang, seperti kesiapan untuk mematuhi aturan dan ucapan terima kasih atas solusi yang diberikan, menunjukkan adanya trust dan hubungan timbal balik yang sehat dalam tata kelola ini.

Selain itu, pemerintah dan masyarakat juga menunjukkan adanya komitmen terhadap pengelolaan berkelanjutan dengan melibatkan aparat keamanan seperti Satpol PP dan Kepolisian untuk mengatasi praktik premanisme yang selama ini meresahkan. Pihak swasta juga turut aktif, seperti yang ditunjukkan oleh hotel-hotel sekitar yang secara mandiri melakukan kegiatan kebersihan dan menggandeng masyarakat serta organisasi lokal. Namun demikian, terdapat beberapa catatan penting. Salah satu tantangan utama yang masih harus diperbaiki adalah intensitas dan efektivitas komunikasi antara pemerintah dan masyarakat. Keterbatasan komunikasi yang konsisten dapat menghambat proses kolaborasi dalam jangka panjang. Oleh karena itu, upaya seperti memperkuat dialog, membuka ruang saran dan kritik secara terbuka, serta membentuk forum komunikasi yang rutin menjadi sangat penting untuk meningkatkan kualitas kolaborasi ini. Hal ini sejalan dengan teori collaborative governance oleh Emerson, Nabatchi, dan Balogh (2012), yang menekankan pentingnya principled engagement, shared motivation, dan capacity for joint action sebagai fondasi kolaborasi yang kuat.

Selain komunikasi, konsistensi dalam pelaksanaan program seperti bersih-bersih pantai juga masih perlu ditingkatkan. Sebagian besar kegiatan tersebut masih bersifat

insidental dan belum dilakukan secara berkala. Agar dampaknya lebih maksimal, kolaborasi lintas sektor perlu dibarengi dengan komitmen anggaran, mekanisme evaluasi bersama, serta integrasi ke dalam rencana pembangunan pariwisata jangka panjang.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa penerapan collaborative governance dalam pengelolaan Pantai Padang telah menunjukkan hasil positif dalam hal penataan, kebersihan, keamanan, dan pemberdayaan masyarakat. Namun, masih dibutuhkan penguatan komunikasi, konsistensi program, dan pelembagaan kolaborasi agar tata kelola ini benar-benar berjalan secara berkelanjutan dan inklusif. Ke depan, kolaborasi ini diharapkan mampu tidak hanya menyelesaikan persoalan teknis, tetapi juga meningkatkan daya saing pariwisata Pantai Padang secara nasional dan internasional, sekaligus memberikan dampak ekonomi yang signifikan bagi masyarakat lokal.

6.2 Saran

6.2.1 Saran Teoritis

Berdasarkan analisis data yang telah dipaparkan di atas, berikut beberapa saran teoritis pada penelitian ini:

1. berdasarkan temuan penelitian, teori Collaborative Governance dapat dikembangkan lebih lanjut dengan menambahkan perhatian pada aspek komunikasi horizontal secara informal, yang dalam praktiknya menjadi salah satu fondasi penting dalam membangun kepercayaan antaraktor di tingkat lokal. Interaksi sosial yang terjadi di luar forum formal ternyata

memainkan peran penting dalam menciptakan trust, mutual understanding, dan komitmen terhadap aturan bersama, yang belum sepenuhnya dijelaskan dalam kerangka teoritis Emerson dkk.

2. collaborative governance tidak cukup hanya dilihat dari keberadaan forum dan partisipasi, tetapi juga perlu diukur melalui indikator keberlanjutan kolaborasi seperti konsistensi program bersama, evaluasi bersama, serta dampak nyata terhadap tujuan bersama, seperti peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pelestarian lingkungan. Ini menunjukkan perlunya pendekatan teoritis yang lebih dinamis, adaptif, dan kontekstual dalam menerapkan kerangka collaborative governance, khususnya di sektor pariwisata yang bersifat multisektor dan sangat dipengaruhi oleh dinamika lokal.

6.2.2 Saran Praktis

Berdasarkan analisis data yang telah dipaparkan di atas, berikut beberapa saran praktis pada penelitian ini:

1. Dinas Pariwisata dan instansi terkait sebaiknya membuat program kolaboratif yang berkelanjutan, seperti kegiatan bersih-bersih pantai, edukasi wisata berkelanjutan, atau pelatihan sadar wisata bagi pedagang dan masyarakat. Program ini tidak cukup dilakukan secara insidental, tetapi perlu dijadwalkan secara berkala agar dampaknya lebih konsisten dan terukur.

2. Penataan pedagang perlu dilakukan dengan pendekatan partisipatif, tidak hanya berdasarkan aturan sepihak, melainkan melalui dialog yang memperhatikan kondisi sosial-ekonomi pedagang. Penataan lokasi jualan, fasilitas, dan zona usaha dapat dikembangkan dengan prinsip win-win solution agar menjaga estetika kawasan tanpa merugikan mata pencaharian warga lokal.
3. Pihak swasta seperti hotel, restoran, dan pelaku usaha lainnya didorong untuk berperan lebih aktif dalam mendukung kebersihan dan promosi kawasan wisata melalui program CSR (Corporate Social Responsibility). Pelibatan mereka dalam forum kolaborasi akan memperkuat daya dukung finansial dan manajerial pengelolaan pariwisata.
4. Perlu adanya evaluasi berkala terhadap pelaksanaan kolaborasi, baik dari sisi pencapaian tujuan (seperti kebersihan, ketertiban, dan jumlah wisatawan), maupun dari sisi partisipasi aktor. Evaluasi ini sebaiknya melibatkan semua pihak yang terlibat dalam tata kelola untuk menjaga transparansi dan akuntabilitas